

# EFEKTIFITAS DAMPAK ALOKASI DANA DESA DALAM PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang)

Oleh:

**Heru Rochmansjah**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang

Email: heru\_rochmansjah@ipdn.ac.id

## Abstrak

Dampak Program Pemulihan Ekonomi terhadap pengeluaran rumah tangga menunjukkan bahwa program tersebut hanya berdampak pada pengeluaran non-konsumsi di desa Citali. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, studi kasus di desa Citali kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Data dalam penelitian terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi data keuangan desa. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Citali yang diambil dari Alokasi Dana Desa masih belum memberikan hasil yang maksimal. Hasil pertanian belum mencapai tingkat yang baik, salah satunya karena teknologi pertanian belum di anggarakan oleh pemerintah desa. Di desa Citali, akibat berkurangnya angkatan kerja, PHK masal dan populasi yang menua, berarti pemulihan jangka panjang mereka yang berkelanjutan harus menjadi fokus pemerintah.

**Kata Kunci:** Program Pemulihan Ekonomi, Alokasi Dana Desa, Desa Citali.

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan letaknya yang strategis, beberapa desa di Kabupaten Sumedang terletak di sepanjang jalur provinsi yang sangat sibuk dan merupakan jalan utama sebagai akses menuju dan kembali ke Pusat Kota/Kabupaten. Desa di wilayah ini dalam pelaksanaan pembangunannya membutuhkan SDA yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan di desa tersebut. Disinilah peran dana yang dikelola oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan diuji untuk selalu menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat (Adji, Darung & Silva, 2020).

Dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penyelenggaraan dalam pemerintahan desa terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaannya. Pemerintah Pusat telah menerbitkan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014. Penerbitan UU mengenai Peraturan Penyelenggaraan Desa ini berdasar pada pertimbangan melaksanakan sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pasal 103 PP Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan (Agustina, 2019). Untuk memaksimalkan kinerja, Pemerintah Desa diwajibkan untuk melaporkan catatan kepada Bupati/Walikota dan BPD/masyarakat yang meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan dan dianggarkan oleh pemerintah desa berdasarkan kewenangan yang ada serta keuangan milik pemerintah (Asy'ari, 2018).

Untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas harus didukung oleh pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan yang baik agar menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan (Atho, Roshidayah, Najmah & Fajri, 2020). Laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk diberikan kepada wali amanat karena melalui laporan keuangan, pemberian kepercayaan dapat mengetahui posisi keuangan organisasi dapat mengambil keputusan tertentu untuk mendukung keberlangsungan suatu organisasi (Guntoro, 2017; PrawiraW et al., 2021). Pelaporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas (Iqbal, 2020).

Namun, menurut laporan dari FITRA Jawa Barat, masih terdapat 30-40% APBD tidak memiliki manfaat bagi masyarakat. Terutama mengenai data-data ganda dalam penyaluran program dari pemerintah, salah satunya dalam anggaran pendukung yang jumlahnya lebih besar dari anggaran inti. Seperti yang disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.** Anggaran Transfer ke Daerah dan Alokasi Dana Desa

No	Tahun	Anggaraan (Dalam Triliun Rupiah)
1	2017	742,0
2	2018	757,8
3	2019	813,0
4	2020	762,5

Sumber: Kementerian Keuangan

FITRA Jawa Barat telah melakukan sebuah simulasi perhitungan mengenai potensi anggaran pemerintah daerah yang akan dikelola oleh masing-masing desa di kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dari data tersebut, masih ada tolak ukur lain untuk menakar efektifitas dan manfaat anggaran. Seringkali, anggaran hanya sampai pada *input/output*

atau hanya pada dimensi fisik, artinya tidak sampai *impact* nyata yang dirasakan masyarakat dari penganggaran tersebut. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen mengaplikasikan amanat UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya mengenai pemaksimalan alokasi anggaran desa (Juliani, 2020). Sedangkan menurut surat tentang Peraturan Bupati Sumedang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa TA 2020, Desa Citali mendapatkan anggaran sebesar Rp. 868.518.000,-. Anggaran dana ini akan dialokasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Setiap desa akan menerima anggaran anggaran yang berbeda-beda. Selain ada dana dari APBN d, desa juga mendapatkan dana dari APBD (Kapoor, 2019). Dana tersebut akan atur dan dikelola secara penuh oleh pemerintah desa untuk memperbaiki sektor infrastruktur serta pemberdayaan berbagai bidang di masyarakat (Lumban, 2018). Pendanaan desa yang tepat merupakan salah satu bentuk desentralisasi untuk mendorong adanya tata pemerintahan yang teratur, karena hal ini akan meningkatkan partisipasi dari masyarakat, serta mendorong akuntabilitas, sifat transparansi, dan daya tanggap dari pemerintah daerah (Kristina, 2020). Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, baik pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan perlu melakukan pengendalian terhadap pengelolaan dana yang dimiliki serta dikelola di wilayahnya (Perbawa, 2020). Penyebab hal ini terjadi yaitu kurangnya sumber daya yang tersedia dan adanya kontrol, baik dari pemerintah dan warga setempat (Muttalib, 2019). Selain itu, perlu diketahui efektivitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa agar tujuan Pemerintah mengalokasikan dana milik Pemerintah Pusat terkontrol, salah satunya untuk program pemulihan ekonomi pasca pandemi (Nugroho & Hermawan, 2020).

Pembangunan di desa masa sekarang yang sumber dananya tidak hanya berasal dari APBD tetapi juga bersumber dari APBN dan investor luar daerah, seperti berbagai kegiatan pemberdayaan di masyarakat pedesaan yang tentunya menuntut aparat desa memiliki pengetahuan yang memadai tentang administrasi dari manajemen keuangan (Purnomo, Rahayu, Riani & Udin, 2020). Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengelola keuangan di desa. Pemahaman yang baik tentang Pengelolaan Dana Desa tentunya akan sangat membantu bagi kepala desa dan perangkat desa yang lain termasuk bendahara (Saloko, Santoso, Alim & Atmawinata, 2020). Pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk didorong, terutama untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid ini.

Pemerintah desa pada umumnya harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan terbuka (Suarni, Anurogo, Adziem & Adiiningrat, 2020) Akuntabilitas, profesionalisme, serta prinsip lain dalam pemerintahan yang baik bisa menjadi acuan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Pemerintahan di desa selain menjalankan fungsi strukturalnya, juga diharapkan dapat menjalankan fungsi sosialnya. Karena pemerintah desa merupakan lembaga yang paling dekat kedudukannya di masyarakat (Suliswati & Razi, 2020).

Desa juga memiliki berbagai keterbatasan, terutama dalam organisasi pemerintahannya, sehingga akan mempengaruhi pula pertumbuhan dan perkembangan desa. Adapun keterbatasan tersebut secara umum adalah: (1) Rendahnya kualitas aparatur yang dimiliki desa; (2) Kebijakan regulasi yang masih kurang matang tentang organisasi, seolah-olah telah diterbit oleh beberapa peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, aturan lain masih diperlukan untuk memantapkan pedoman operasional; dan (3) Kapasitas perencanaan di tingkat desa yang masih rendah, seringkali mengakibatkan kurangnya sinkronisasi dan keluaran (*outcomes*) serta aplikasi dari kebijakan mengenai kebutuhan dari masyarakat yang menjadi *input* sebuah kebijakan (Zakaria, 2016).

Sarana dan prasarana administrasi pemerintahan masih sangat kurang memadai, selain mengganggu efisiensi dan efektifitas kerja, juga dapat menurunkan motivasi aparatur pelaksana desa, sehingga menghambat pencapaian tujuan, tugas, serta pekerjaan. Pertumbuhan dan pembangunan desa merupakan salah satu upaya kegiatan usaha harus dilakukan secara matang, terencana, dan bertanggung jawab dengan tujuan untuk mencapai transformasi yang lebih baik, artinya pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua. Akses ke layanan publik lebih berkembang di kota daripada di desa, sehingga terkadang terjadi kesenjangan yang lebih besar antara layanan publik. Strategi pembangunan semacam ini tidak akan mampu membuat pemulihan ekonomi masyarakat.

## 2. METODE

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang dilakukan di desa Citali, yang terletak di wilayah di Kecamatan Pamulihan karena berdasarkan data dan survey sebelumnya diketahui bahwa Kabupaten Sumedang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBN sebesar Rp. 222.389.199.000, dan dari anggaran yang berbeda setiap desa sesuai dengan surat tentang Peraturan Bupati Sumedang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2020. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mempercepat pembangunan dalam segi infrastruktur serta pemberdayaan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari laporan keuangan desa dan kuisioner yang di sebar kepada responden penelitian, yaitu data yang disebar kepada warga desa Citali (sebanyak 1.714 Keluarga). Dalam penelitian tentang EADD di desa Citali, data dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung dan mendalam dengan pengelola keuangan desa serta responden.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan dana desa adalah: (1) Sampai dengan akhir tahun 2020 penyerapan dana desa relatif masih rendah. Dana yang telah disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota sebesar 86% namun yang telah sampai ke desa hanya 63,5%. Penyerapan yang rendah di wilayah desa ini disebabkan oleh kurangnya kesiapan dalam menerima serta mengelola dana tersebut. Lambatnya penyaluran dana dari desa ini disebabkan oleh sistem birokrasi yang rumit. Akibat dari hal ini, efektivitas untuk menggerakkan perekonomian di desa belum juga optimal; (2) Kondisi pemerintahan desa sangat Hal ini berdampak pada akuntabilitas serta efektivitas dari pengelolaan administrasi keuangan; (3) *Database* yang sangat bervariasi. Masih ada desa yang belum menyusun LKMD yang sangat penting dan sangat diperlukan; (4) Desa tidak memiliki sebuah prosedur yang diperlukan agar dapat memastikan administrasi keuangan yang baik.; dan (5) Kualitas darei SDM secara umum sangat terbatas.

#### Evaluasi Dampak Alokasi Dana Desa

Estimasi pada Tabel 2 digunakan untuk menghitung skor kecenderungan untuk setiap rumah tangga yang menjadi responden penelitian. Tabel 2 menunjukkan Data Responden dampak Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat.

**Tabel 2.** Data Responden Desa Citali

	<i>Coeff.</i>	<i>t-stat</i>
Jumlah Keluarga di Desa Citali		1,714 Keluarga
<b>Karakteristik</b>		
Ukuran	0,161*	2,28
Penerima	-0,086	-1,21
Anggota Keluarga yang Bersekolah	-0,059	-0,54
<b>Tipe Keluarga</b>		
Satu Orang	-0,537	-1,52
Suami Istri	0,005	0,03
Satu Orang tua dan satu Anak yang belum menikah	-0,456	-1,72
Lainnya	-0,432	-1,49
<b>Sumber Utama Pendapatan Rumah Tangga</b>		
Pengusaha	0,086	0,49
Profesional	-0,477	-1,53
Pekerja/Buruh	-0,384	-1,70
karyawan lain	-0,231	-1,27
Menganggur	-0,350	-2,00
<b>Karakteristik Kepala Rumah Tangga</b>		
Pria	-0,343	-2,49
Wanita	0,000	-0,01
Belum Pernah Menikah	-0,318	-0,76
Janda/Duda/Cerai	-	-
<b>Pendidikan</b>		
Tidak Sekolah	-	-
Sekolah Dasar	-	-

SLTP	0,225	1,05
SLTA	-0,002	0,05
Diploma	0,730*	2,42
Sarjana	-0,071	-0,29
<b>Jumlah Responden</b>	<b>1,714</b>	

Sumber: Data diolah

Data hasil data responden di atas, rata-rata responden adalah masyarakat dengan ekonomi di bawah UMR. Dengan lulusan SLTP terbanyak, yaitu koefisien berada di angka 0.225, hal ini mengindikasikan bawah pemerintah juga perlu memperhatikan dimensi pendidikan dengan mengalokasikan ADD di wilayah desa Citali untuk penguatan Sumber Daya Manusia. Dari segi mata pencaharian, koefisien Responden yang menganggur berada pada angka 0.350, hal ini dikarenakan PHK massal yang dialami masyarakat semasa pandemi, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah harus serius dalam usaha mengefektifkan program Pemulihan Ekonomi Masyarakat.

Kepala rumah tangga, sebagian besar masih didominasi laki-laki, berdasarkan hasil wawancara dengan responden wanita, sebagian besar Ibu Rumah Tangga tidak memiliki pendapatan lain selain dari suaminya. Hal ini dapat menjadi evaluasi bagi efektifitas Alokasi Anggaran Desa untuk lebih memperbanyak program pemberdayaan perempuan di desa Citali. Di bawah ini, disajikan program pemerintah desa Citali untuk Pemulihan Ekonomi Masyarakat:

**Tabel 3.** Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat Desa Citali

Program	Pendapatan Pertanian	Pendapatan Non-Pertanian	Total Pendapatannya
Pembagian Bibit Massal	0,651*	0,215	-0,042
<i>t-stat</i>	(2,42)	(0,53)	(-0,62)
Pembagian Pupuk Subsidi	0,260	0,780	0,089
<i>t-stat</i>	(0,69)	(2,87)	(1,28)
Pembagian Herbisida untuk Pengendalian Gulma	0,042	-0,351	0,089
<i>t-stat</i>	(0,09)	(-0,78)	(0,92)
Program Simpan Pinjam	0,538	-0,200	-0,077
<i>t-stat</i>	(1,49)	(-0,37)	(-0,83)
<b>Program</b>	<b>Konsumsi</b>	<b>Non-konsumsi</b>	<b>Total</b>
Pembagian Beras Bersubsidi	-0,008	0,034	0,014
<i>t-stat</i>	(-0,24)	(0,37)	(0,36)
Pendanaan modal mitra UMKM	0,022	0,580*	-0,034
<i>t-stat</i>	(0,42)	(4,31)	(0,59)
Alokasi Dana Penyediaan Tempat Jualan	-0,014	0,060	-0,020
<i>t-stat</i>	(-0,30)	0,34	(0,26)
Pemberian Modal Pemberdayaan Pemuda	0,078	0,381*	0,081
<i>t-stat</i>	(1,31)	(2,45)	(1,33)
<b>Kemiskinan</b>	<b>Pemasukan</b>	<b>Konsumsi</b>	<b>Gap</b>
Keluarga Tunggal	-0,932	3,843	-0,004
<i>t-stat</i>	(-0,41)	(1,452)	(0,41)
Suami-Istri	3,257	-4,317	0,035
<i>t-stat</i>	(0,67)	(-2,03)	(1,60)
Orang tua dengan satu anak yang belum menikah	-4,644	-0,978	-0,008
<i>t-stat</i>	(-0,74)	(-0,26)	(0,46)
Lainnya	0,326	-1,546	0,003
<i>t-stat</i>	(0,036)	(-0,44)	(0,15)

Sumber: Data diolah

Hasil yang diperoleh dari perbandingan dampak dari Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa Program Pemulihan Ekonomi tidak berdampak

signifikan pada pendapatan rumah tangga responden, kecuali hanya sebagian kecil sektor, dimana pemulihan ekonomi telah meningkatkan pendapatan usaha tani per kapita di wilayah tersebut sebesar 55%. Karena pendapatan pertanian merupakan bagian kecil dari pendapatan rumah tangga di Desa Citali, dampaknya tidak cukup untuk meningkatkan pendapatan total. Lebih lanjut, 15% responden mengaku harus meminjam dana dari sumber lain untuk melunasi hutang. Bukti terkait ini menunjukkan bahwa Program Pemulihan Ekonomi dari Efektifitas Alokasi Dana Desa tidak menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memungkinkan membayar kembali pinjamannya.

Meskipun demikian, temuan ini menegaskan bahwa responden memiliki potensi yang rendah untuk membelanjakan uangnya untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau belanja kebutuhan primer, karena pengeluaran non-konsumsi tidak mengandung unsur yang terkait kebutuhan primer atau tabungan rumah tangga. Aspek yang sangat penting dari evaluasi ini adalah bahwa program Program Pemulihan Ekonomi tidak berdampak pada pemulihan ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan rumah tangga, terutama keluarga yang terdampak pandemi yang memiliki krisis finansial. Program Pemulihan Ekonomi hanya meningkatkan pendapatan pertanian di sebagian kecil wilayah desa Citali. Perubahan yang menguntungkan dalam pendapatan pertanian juga tidak cukup untuk meningkatkan total pendapatan rumah tangga sebagian besar responden. Data ini menekankan kurangnya efektifitas pemerintah untuk mengentaskan kondisi kemiskinan melalui kredit mikro saja. Program lain, termasuk program investasi, simpan pinjam dan teknologi pertanian, belum dianggarkan secara serius.

#### **Analisa Hasil**

Pemulihan ekonomi bukan hanya tentang memiliki sumber daya yang diperlukan, tetapi juga tentang kemauan dan kemampuan untuk menerjemahkan sumber daya menjadi tindakan adaptasi yang efektif. Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat desa Citali, setidaknya ada beberapa hal yang dapat dijadikan prioritas penyaluran ADD oleh pemerintah, misalnya:

#### **Aset**

Baik dari sektor swasta atau publik, adalah sumber daya keuangan, teknis, dan layanan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Setelah pandemi, ketika orang memiliki aset yang tersedia, mereka biasanya lebih mampu untuk pulih dan beradaptasi. Dimensi aset dalam rekonstruksi industri pasca pandemi terutama berasal dari pemerintah, perusahaan, investor luar daerah dan penduduk desa lain. Peran pemerintah desa, setidaknya: 1) Merumuskan peraturan revitalisasi aset yang dimiliki desa; 2) Penetapan dana bantuan rekonstruksi, dan 3) penetapan peraturan pembiayaan dana pembangunan kembali. Peran utama investor luar daerah adalah

bekerja sama dengan operator dan pengelola dana desa untuk memberikan dukungan teknis dan bantuan keuangan. Warga juga dapat mendanai bisnis yang beroperasi di desa. Bahkan warga desa juga dapat berkontribusi untuk pemulihan melalui penggalangan dana ini, namun masih minim sosialisasi.

#### **Fleksibilitas**

Fleksibilitas mengacu pada kesempatan untuk beralih antara strategi adaptasi, dan keragaman pilihan adaptasi potensial yang tersedia. Misalnya, seorang petani dapat memilih untuk mengadopsi budidaya tanpa tanah atau berhenti bertani untuk karir lain. Dalam proses pemulihan pilar tersebut, kita dapat melihat keluwesan strategi tanggap pasca pandemi dari berbagai entitas seperti pemerintah, perusahaan, dan warga.

Kebijakan pemerintah dan strategi pembangunan disesuaikan untuk memperkenalkan teknologi pertanian, untuk mengaktifkan wilayah di desa Citali. Bencana pandemi Covid ini memberikan “*jendela peluang*” bagi penduduk dan perusahaan lokal untuk membangun kapasitas respons yang fleksibel dan menyesuaikan strategi mata pencaharian mereka. Dalam keadaan normal, penyesuaian semacam ini akan lebih tidak mungkin karena mungkin memerlukan lebih banyak biaya dan dianggap sebagai risiko yang lebih besar, namun dalam keadaan sekarang hal ini harus dilihat sebagai peluang inovasi.

#### **Organisasi**

Organisasi membuat kerjasama, tindakan kolektif, dan berbagi pengetahuan menjadi mungkin. Jaringan formal dan informal antara individu, komunitas dan organisasi dapat membantu orang untuk mengatasi perubahan dengan memberikan dukungan sosial dan akses ke pengetahuan dan sumber daya. Yang penting, organisasi sosial bersifat multi-dimensi, termasuk tiga dimensi yaitu individu, kolektif dan organisasi. Pemerintah harus menekankan bahwa pemberdayaan organisasi semacam ini sangat penting untuk proses pemulihan ekonomi. Karena situasi di lapangan biasanya berubah dengan cepat setelah pandemi. Faktor-faktor tersebut memungkinkan mereka memiliki modal sosial yang lebih besar untuk mengembangkan strategi adaptif sesuai dengan kondisi lokal dan secara kreatif memecahkan masalah lokal.

#### **Sosialisasi**

Pembelajaran mencerminkan kemampuan orang untuk menghasilkan, menyerap, dan memproses informasi baru tentang risiko dari pandemi, beradaptasi dengan pilihan, dan menangani serta mengelola ketidakpastian. Sosialisasi dapat berupa eksperimen atau pengalaman, terjadi pada atau melintasi berbagai skala organisasi, ruang, dan waktu.

Pemulihan kreatif memanfaatkan sepenuhnya sumber daya manusia dan bisnis yang ada untuk mengubah kerugian yang disebabkan oleh bencana menjadi peluang. Belum ada fokus pada kemitraan



luar daerah dalam teknologi pertanian dan penanaman modal usaha. Strategi Pemulihan Ekonomi Masyarakat, yang dibentuk oleh penduduk setempat dan berfokus pada pemulihan mata pencaharian, memungkinkan desa Citali untuk menunjukkan kemampuan beradaptasi dan pengorganisasiannya sendiri dalam lingkungan baru setelah pandemi berakhir.

#### Pemberdayaan

Pemberdayaan umumnya mengacu pada kemampuan orang-individu atau kolektif-untuk membuat pilihan bebas dalam menanggapi perubahan lingkungan. Hal ini tergantung pada keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk menangani dan mengelola situasi yang diharapkan dan mengendalikan peristiwa yang mempengaruhi mereka, termasuk aspek pemberdayaan, motivasi, dan kognisi.

Pengusaha lokal dan warga harus bisa mengelola dan menyesuaikan keyakinan, persepsi, dan motivasi, agar proses pemulihan ekonomi bisa berjalan lancar. Pemerintah dan penduduk desa semuanya telah mengembangkan kesadaran akan peluang ekonomi baru pasca pandemi, dan bisnis telah menyesuaikan strategi mereka untuk mengatasi situasi jangka panjang. Terutama, warga telah membingkai ulang pemikiran mereka untuk fokus pada jangka panjang dengan membangun kembali desa Citali untuk masa depan anak-anak mereka, misalnya pengalokasian dana untuk pasar lokal warga desa Citali. Promosi pasar ini memungkinkan penduduk untuk secara bertahap mendapat pemasukan tambahan yang aman dan berkelanjutan tanpa campur tangan pihak lain. Rekonstruksi dan pembaruan tempat berjualan telah menyediakan lapangan kerja bagi penduduk lokal, membuat industri lokal lebih beragam dan dinamis.

#### 4. KESIMPULAN

Program Pemulihan Ekonomi Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Citali yang diambil dari Alokasi Dana Desa masih belum memberikan hasil yang maksimal. Hasil pertanian belum mencapai tingkat yang baik, salah satunya karena teknologi pertanian belum di anggarkan oleh pemerintah desa. Di desa Citali, akibat berkurangnya angkatan kerja, PHK masal dan populasi yang menua, berarti pemulihan jangka panjang mereka yang berkelanjutan harus menjadi fokus pemerintah. Kunci untuk membangun ketahanan ekonomi yang adaptif adalah menjadikan mata pencaharian berkelanjutan bagi penduduk yang terkena dampak pandemi sebagai penekanan utama, dan menjadikan penduduk lokal menjadi peserta dominan dalam pemulihan industri mereka sendiri. Strategi ini dapat mendorong pemulihan ekonomi dan sosial jangka panjang di daerah terdampak pandemi dan akan membantu mengembangkan kapasitas lokal untuk melawan dampak bencana di masa depan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adji, F. F., Darung, U., & Silva, K. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Melalui Program Bina Desa Mandiri Peduli Gambut di Kawasan Eks PLG Sejuta Hektar Provinsi Kalimantan Tengah. *Pengabdian Kampus: Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(2), 26-34.
- Agustina, E. (2019). The role of community empowerment carried out by village government in the regional autonomy era. *Unifikasi: jurnal ilmu Hukum*, 6(1), 34-39.
- Agustina, Y., Septiany, P. R., Arlinda, A., & Safitri, K. (2020). Pembuatan Keripik Kelapa Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana di Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Karinov*, 3(2), 79-83.
- Asy'ari, Q. (2018). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana Di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor dan Kekeringan di Pamekasan 2007). *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 1(2), 153-168.
- Atho'Al-Faruqi, R., Roshidayah, R., Najmah, H., & Fajri, R. N. (2020). Kegiatan Bakti Sosial Untuk Membantu Ekonomi Lansia Di Desa Jambayan Pada Era New Normal. *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 617-619.
- Guntoro, D. A. (2017). Karakteristik Dan Persepsi Masyarakat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember Terhadap Kegiatan Pemulihan Ekosistem Taman Nasional Meru Betiri. *Agriekonomika*, 6(1), 52-61.
- Iqbal, R. M. (2020). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Pertanian Pasca Gempabumi Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. *ETD Unsyiah*.
- Juliani, H. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa Sebagai Motor Penggerak Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 409-429.
- Kapoor, S. (2019). Entrepreneurship for economic and social empowerment of women: A case study of a self help credit program in Nithari Village, Noida, India. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 13(2), 123-142.
- Kristina, N. M. R. (2020). Pemulihan Ekonomi Pariwisata Bali di Era New Normal. *CULTOURE: Culture Tourism and Religion*, 1(2), 136-142.
- Lumban Gaol, P. C. E. (2018). Tingkat Persepsi Masyarakat dalam Upaya Pemulihan dan Pelestarian Ekosistem Gambut di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.

- Muttalib, A. (2019). Analisis dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara (KLU). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 5(2), 84-91.
- Nugroho, A., & Hermawan, S. (2020). Strategi Kebijakan Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Perspektif Hukum Ekonomi. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 1-15.
- Perbawa, S. L. P. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Perarem Desa Adat Dalam Penanganan Covid 19. *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 23-30.
- PrawiraW, R., Maulida, H., & Achmad, W. (2021). Narrating the Implementation of Social Welfare Community Program. Review of International Geographical Education Online, 11(5), 228-235.
- Purnomo, S., Rahayu, E. S., Riani, A. L., Suminah, S., & Udin, U. D. I. N. (2020). Empowerment model for sustainable tourism village in an emerging country. *The Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, 7(2), 261-270.
- Saloko, S., Santoso, B. B., Alim, S., & Atmawinata, L. M. (2020). Pendampingan Ekonomi Pascabencana Alam Melalui Pengolahan Produk Jambu Mete Bagi Masyarakat Desa Sugian Lombok Timur. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(5), 1006-1017.
- Suarni, A., Anurogo, D., Adziem, F., Abdi, M. N., & Adiningrat, A. A. (2020). Edukasi Pemulihan Ekonomi Rumah Tangga dari Dampak Pandemi Covid-19 pada Disabilitas Desa Lamanda Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan (PKM). *JTCSA ADPERTISI JOURNAL*, 1(1), 20-32.
- Suliswati, D., & Razi, F. (2020). Kebijakan Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Dalam Rekonstruksi Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 348-359.
- Zakaria, R. Y. (2016). Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No. 22 Tahun 1999. *UNISIA*, (46), 280-298.